



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MADISON
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 202963

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/45 m² di KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 950 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 1736 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, LAINNYA Rp. 70.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m²/240 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah Seluas 1100 m² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



5. MOTOR, HONDA TRAIL RODA 2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	302.443
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.431.302.443
III. HUTANG	Rp.	110.456.184
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.320.846.259

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.